



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULLU**

**KAPUAS HULLU!
SEMAKIN NEBAT!**

RENSTRA

Rencana Stratgis



<https://setda.kapuashulukab.go.id/renstra>

2025-2029





KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Renstra Sekretariat Daerah adalah dokumen Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2025-2029 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu dipandang perlu menyusun Renstra dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik secara internal maupun eksternal dan tuntutan profesionalisme pelayanan pemerintah yang cepat, tepat, efektif dan efisien sebagai prasyarat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance and clean government*).

Kami sadar bahwa didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran demi tercapainya realisasi target dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan. Dan akhirnya, semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Putussibau, 21 Oktober 2025

Pj. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



Agustinus Stormandi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR LAMPIRAN.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	9
1.3. Maksud dan Tujuan.....	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	15
2.1.1.1. Kedudukan	15
2.1.1.2. Tugas dan Kewajiban.....	15
2.1.1.3. Fungsi Sekretariat Daerah	15
2.1.1.4. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.....	16
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia.....	18
2.1.2.2. Gedung Kantor	20
2.1.2.3. Kendaraan, Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor.....	20
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Periode Lalu).....	22
2.1.4. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD.....	26
2.1.5. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah	28
2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.6.1. Kekuatan.....	33
2.1.6.2. Kelemahan.....	33
2.1.6.3. Peluang.....	33



2.1.6.4	Ancaman	34
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.2.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
2.2.2.1	Visi	38
2.2.2.2	Misi	39
2.2.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	41
2.2.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
2.2.5	Isu Strategis	43
BAB III	49
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	49
3.2	Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	49
3.3	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	51
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	52
BAB IV	56
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
4.1	Uraian Program	56
4.2	Kegiatan	57
4.3	Sub Kegiatan	60
4.4	Indikator Kinerja Utama	68
4.5	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	69
BAB V PENUTUP	72
LAMPIRAN	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Status Kepegawaian	18
Tabel 2 Klasifikasi ASN Sekreariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Golongan	19
Tabel 3 Klasifikasi SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	19
Tabel 4 Kendaraan, Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor	20
Tabel 5 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ..	24
Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	25
Tabel 7 Program Kegiatan yang mendukung BUMD	28
Tabel 8 Kerangka Kerja Analisis SWOT Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	35
Tabel 9 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
Tabel 10 Permasalahan dan Isu Strategis	45
Tabel 11 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	61
Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	68
Tabel 14 Indikator Kinerja Daerah/ Program (IKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029	71



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Tujuan, Sasaran dan Strategi	74
LAMPIRAN 2 Indikator Kinerja Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	74
LAMPIRAN 3 Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	74
LAMPIRAN 4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD	74
LAMPIRAN 5 Tanggapan Catatan Hasil Reviu (CSR) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Ranhir RENSTRA 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	74
LAMPIRAN 6 Dokumentasi Rapat Penyusunan RENSTRA 2025-2029	74
LAMPIRAN 7 Daftar Link Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	74





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi untuk pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos yang kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu dibidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi-indikasi, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memberikan pelayanan prima



kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparaturnya yang baik (*good governance*) dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Maka untuk mewujudkan tugas tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparaturnya sipil negara pada instansi daerah.

Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini, pelayanan prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik - baiknya sehingga dapat memenuhi sendi - sendi tata layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Pelayanan prima seperti ini yang harus diselenggarakan oleh Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang



ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima, seperti : semangat kompetisi, inovatif perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*). Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan prima adanya perumusan rencana strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi kepala daerah.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen Renstra, hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Rensta ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
12. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



- Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029;
 16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 18. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22/SETDA/PERKEU/2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 19. Keputusan Sekretarias Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 54/SETDA/PERKEU/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029;
 20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 000.7.2/953/BAPPEDA/P3 Tanggal 15 April 2025 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 900/1124/SETDA/PERKEU Tanggal 02 Mei 2025 Perihal Penyusunan Ranwal RENSTRA 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 22. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 000.7.2/1017/BAPPEDA/P3 Tanggal 21 Mei 2025 Perihal Penyusunan



Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029;

23. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 900/1381/SETDA/PERKEU Tanggal 23 Mei 2025 Asistensi Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) RENSTRA Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk tahun anggaran 2025-2029.

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan secara umum di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam serta di bidang Administrasi Umum di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelaksanaan urusan tersebut bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan Renstra yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penjabaran secara teknis Tujuan dan Sasaran RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025-2029;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2025-2029;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan;



1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
 - 2.1.5. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat daerah
 - 2.1.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 2.2.5. Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan



3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dipaparkan

4.1 Program

4.2 Kegiatan

4.3 Sub Kegiatan

4.4 Indikator Kinerja Utama

4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1.1. Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

2.1.1.2. Tugas dan Kewajiban

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.1.3. Fungsi Sekretariat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;



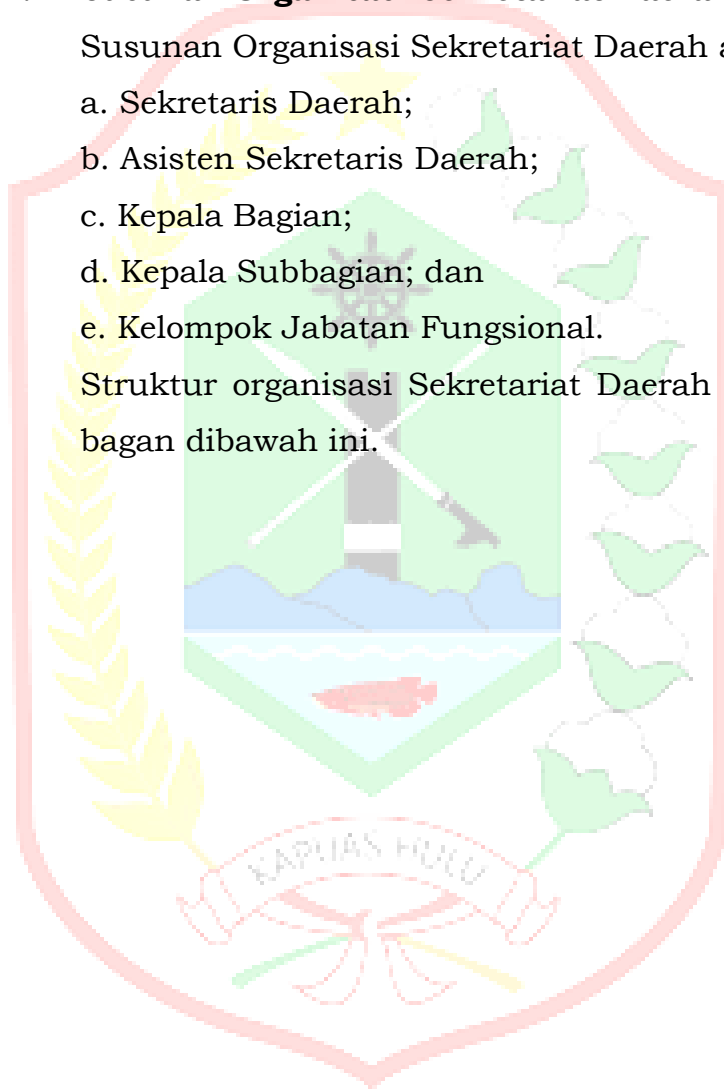
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1.4 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah terdiri dari:

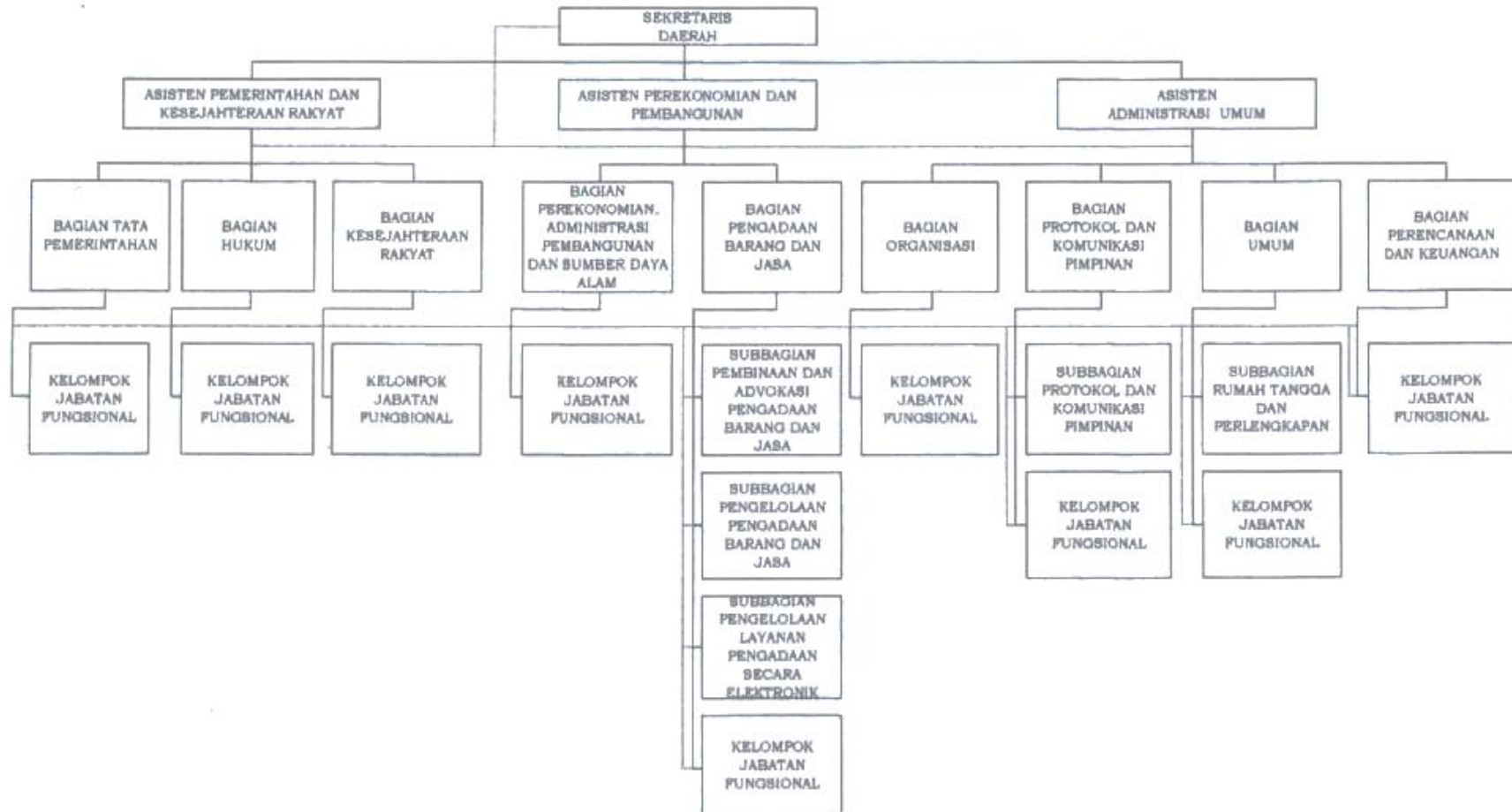
- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Bagian;
- d. Kepala Subbagian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah dapat dilihat pada bagan dibawah ini.





STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 107 TAHUN 2021





2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Sekretaris daerah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki sumber daya aparatur sebanyak kurang lebih 227 (dua ratus dua puluh tujuh) personil, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan Non ASN. Adapun komposisi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai berikut

Tabel 1 Klasifikasi SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	99
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	52
3	Non ASN	76
	Total	227

Sumber: data pegawai kondisi September 2025 (diolah)



Tabel 2 Klasifikasi ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	14
2	III	77
3	II	8
4	I	0
Total		99

Sumber: data pegawai kondisi September 2025 (diolah)

Tabel 3 Klasifikasi SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Pendidikan	PNS	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	S2	16	0	0	16
2	S1 /DIV	51	33	16	100
3	D-III	9	7	11	27
4	D-II	0	0	0	0
5	D-I	0	0	0	0
6	SMA /Sederajat	23	13	48	84
7	SMP / Sederajat	0	0	0	0
8	SD/Sederajat	0	0	0	0
Total					227

Sumber: Sumber: data pegawai kondisi September 2025 (diolah)



2.1.2.2 Gedung Kantor

Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk sementara selama kantor yang baru sedang dalam proses pembuatan sehingga sementara menempati Gedung eks Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau dengan kondisi yang sempit dan relatif kecil sehingga terdapat beberapa bagian seperti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berada di luar lingkungan kantor Sekretariat Daerah. Diperkirakan pada Tahun 2026 sudah menempati kantor Pelayanan Satu Atap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang baru tersebut.

2.1.2.3 Kendaraan, Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor

Adapun Daftar Kendaraan, Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor yang ada pada Sekretariat Kantor pada Sekretariat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Kendaraan, Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Generator Set (Disel Alat Besar)	2	Unit
2	Transportable Generating Set	1	Unit
3	Mobil (Perorangan)	8	Unit
4	Body Speed Boat	4	Unit
5	Mini Bus	21	Unit
6	Mobil Pick Up (Anggkutan Barang)	2	Unit
7	Sepeda Motor	100	Unit
8	Motor Tempel	2	Unit
9	Mesin Pompa air PMK	1	Unit



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
10	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
11	Lemari Besi/Metal	14	Unit
12	Lemari Kayu	18	Unit
13	Rak Besi	7	Unit
14	Filing Cabinet Besi	7	Unit
15	Rotary Filling	3	Unit
16	Buffet	2	Unit
17	Lemari Katalog	2	Unit
18	Lemari Kaca	10	Unit
19	Alat Penghancur Kertas	13	Unit
20	Lampu-lampu Kristal	4	Unit
21	Alat Sidik Jari	5	Unit
22	Papan Pengumuman	1	Unit
23	Tong Sampah	22	Unit
24	Meja Kerja Kayu	65	Unit
25	Kursi Kayu	4	Unit
26	Meja Rapat	20	Unit
27	Tempat Tidur Besi	9	Unit
28	Meja Podium	1	Unit
29	Meja Tambahan	4	Unit
30	Meja Panjang	8	Unit
31	Meja 1/2 Biro	4	Unit
32	Kasur/Spring Bed	15	Unit
33	Meja Makan Kayu	6	Unit
34	Kursi Tamu	8	Unit
35	Kursi Putar	47	Unit
36	Kursi Biasa	9	Unit
37	Partisi	1	Unit
38	Rak Sepatu	2	Unit
39	Nakas	5	Unit
40	Sofa	23	Unit
41	Meja Rias	3	Unit
42	Bantal	1	Unit
43	Seprei	21	Unit
44	Washtafel	1	Unit
45	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit
46	Mesin Cuci	5	Unit
47	Automatic HandDrayer	1	Unit
48	Lemari Es	17	Unit
49	A.C.	104	Unit
50	Portable Air Conditioner (Alat	4	Unit
51	Kipas Angin	21	Unit



NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
52	Cold Storage (Alat Pendingin)	2	Unit
52	Televisi	22	Unit
54	Dispenser	25	Unit
55	Mesin Pompa Air	6	Unit
56	Tabung Pemadam Kebakaran	12	Unit
57	P.C Unit	22	Unit
58	Lap Top	78	Unit
59	Note Book	20	Unit
60	Tablet PC	11	Unit
61	Printer	64	Unit
62	Server	2	Unit
63	Router	2	Unit

Sumber: Data Aset 2024 Sekretariat Daerah Kab. Kapuas Hulu (diolah)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Periode Lalu)

Strategi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada periode 5 (lima) tahun yang lalu diarahkan untuk membangun disegala bidang melalui misi keempat Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Dengan tujuan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- 1) Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Informasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 mengalami banyak kendala seperti IKU yang tidak di *breakdown* pada sasaran program atau sasaran kinerja Asisten atau dapat dikatakan



bahwa sasaran kinerja pada level Asisten/Program tidak selaras dengan IKU Sekda.

Kendala lainnya bahwa Renstra 2021-2026 tidak pernah dilakukan Reviu untuk melihat progress capaian kinerja strategisnya serta tidak pernah dilakukan pengukuran kinerja dari level Asisten/Program sampai dengan level Kepala Bagian/ Kegiatan serta Sub Kegiatan. Selain itu Renstra juga tidak pernah dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta tidak dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi pada LKjIP/Reviu Inkab dan masih banyak lagi kendala yang terjadi pada Renstra 2021-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun Capaian Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel dibawah ini:





Tabel 5 Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target 2025	Satuan
		2021	2022	2023	2024		
1	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	-	8,12	-	-	-	Nilai
2	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	B	D	CC	B	B	Predikat
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	-	-	2,67	2,67	-	Nilai
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	81,5	-	83,8	87,8	84,00	Nilai
5	Level ULP	3	-	-	-	-	-
6	Persentase pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement	100	-	-	-	-	%
7	Persentase Aset Tanah Bersertifikat	55	-	-	-	-	%
8	Persentase perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100	-	-	-	-	%
9	Persentase BUMD Sehat	75	-	-	-	-	%

Sumber: <https://bit.ly/LKjIP-Setda-KH>

Realiasi anggaran hampir sama keadaannya dengan capaian kinerja, pada rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 terdapat banyak program maupun kegiatan yang tidak terealisasi disebabkan kendala yang telah disebutkan tadi diatas salah satunya tidak pernah melakukan reuiu terhadap pencapaian Renstra. Adapun capaian terhadap realisasi anggaran seperti terlihat tabel dibawah ini:



Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)				Target 2025
		2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	-	99,7	-	-	-
2	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah		98,37	99,95		
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten	98,12	99,44	99,27	98,22	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	97,4	98,72	97,65		
5	Level ULP		-	-	-	-
6	Persentase pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui E-Procurement	98,47	-	-	-	-
7	Persentase Aset Tanah Bersertifikat	94,41	-	-	-	-
8	Persentase perumusan kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	99,4	-	-	-	-
9	Persentase BUMD Sehat	99,58	-	-	-	-

Sumber: <https://bit.ly/LKjIP-Setda-KH>



2.1.4 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD

Di Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (sebelum 2014 disebut Perusahaan Daerah) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan sebuah kegiatan komersial atas nama pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan kota. BUMD adalah "organisasi yang memiliki status korporat yang independen, di pimpin oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh pejabat pemerintah daerah dengan kepemilikan mayoritas publik. Banyak BUMD yang telah beroperasi dengan retribusi yang membuatnya berbeda dengan pajak dari lembaga pemerintahan.

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dan masih sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. BUMD bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun BUMD yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

- Perusahaan Daerah Uncak Kapuas (PD.UK)
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uncak Kapuas
- Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri (PT.UKM)

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain memiliki kewenangan dalam penyertaan modal, subsidi, penugasan daerah, penggunaan laba, koordinasi, pembinaan, dan Pengawasan BUMD.

Bupati sebagai pemilik modal pada Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas atau pemegang saham pada Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas mempunyai kewenangan antara lain;

- Mengambil Keputusan dalam RUPM/RUPS;
- Melimpahkan seluruh atau Sebagian kewenangan dalam RUPM/ RUPS;



- Pengawasan Keuangan Perusahaan, pengawasan dan pembinaan SDM, Pembinaan Kinerja Perusahaan, SOTK dan pengawasan Operasional pengembangan Perusahaan.

Pelimpahan kewenangan dilakukan dengan membuat Surat Perintah dan Surat Kuasa kepada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk menjaga keberlanjutan pengawasan terhadap BUMD yang dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan bekerjasama dengan stake holders terkait serta bekerja sama dengan dewan pengawas/dewan komisaris pada Perusahaan Daerah dan Perseroan terbatas antara lain meliputi:

- Kinerja direktur dan Pejabat Struktural yang berada dibawahnya Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
- Program Kerja Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, Perusahaan Daerah Air Minuman dan Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri;
- SPBU Kedamin;
- Hotel Rindu Kapuas;
- Hotel Badau Permai Nanga Badau; dan
- Hotel Sentarum Indah Lanjak.

Berkaitan dengan yang telah diuraikan diatas maka kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menetapkan indikator dan target Kinerja yang berkaitan dengan BUMD seperti tabel berikut ini:



Tabel 7 Program Kegiatan yang mendukung BUMD

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Capaian 2024	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA
						2025	2026	2027	2028	2029	
4.01.0 3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan dibidang Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	25	%	100	100	100	100	100	100
4.01.0 3.2.01. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	2	2	2	2	2	10
4.01.0 3.2.01. 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Lap	2	2	2	2	2	10
4.01.0 3.2.01. 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dok	1	1	1	1	1	5
4.01.0 3.2.01. 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4	dok	1	1	1	1	1	5
4.01.0 3.2.01. 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4	Dok	1	1	1	1	1	5

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>

2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, hal ini sebagaimana tertuang didalam pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun



2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Melalui Kerja Sama tentunya sebagai bagian proses penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Kerja sama Daerah merupakan salah satu jalan untuk membuka dan menarik investasi bagi daerah.

Kerjasama yang dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan Kerja Sama Sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerjasama yang telah dilaksanakan antarlain sebagai berikut (sumber: <https://drive.google.com/file/d/1v8z4KfGX-whiXBeeRpHjPhkbR82sQ9aq/view> (Laporan Tahun 2024) :

- Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Koordinasi Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan”
- Kerja Sama di Bidang Kesehatan dengan Kabupaten Sintang;



- Rujukan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sintang;
- Rujukan Pelayanan Kesehatan Jiwa Kabupaten Sintang;
- Pelayanan Rawat Inap Pasien Orang dengan Gangguan Jiwa yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu di Kabupaten Sintang;
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh;
- Dukungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari di Desa Bahenap, Desa Kensuray, Desa Bunut Hulu, Desa Tamao, Desa Lanjak Deras, Desa Mensiau dan Desa Melemba, Di Kabupaten Kapuas Hulu
- Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Kantor Cabang Putussibau;
- Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemimpin Cabang Putussibau PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemimpin Cabang Semitau PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
- Kartu ATM Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Institusi;
- Pelaksanaan Pekerjaan/Kegiatan Swakelola Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah;
- Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 1206 Putussibau;
- Karya Bakti dan Bakti Sosial Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti Membangun Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu;



- Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan II”
- Penguatan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
- Sinergitas Program Pembangunan Daerah melalui Collaborative Governance dengan Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Penguatan Tata Kelola Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat”
- Addendum Kesepakatan Bersama Nomor 100.2.2.3/27/Kb/PEM/2023 atau 143/NW-Madani/X/2023 Tentang Sinergitas Program Pembangunan Daerah melalui Collaborative Governance dengan Mitra Pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
- Pendampingan Perumusan Kebijakan Daerah Lestari di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat”
- Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik di Kabupaten Kapuas Hulu”
- Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Mekanisme Pembayaran Rekening Listrik Di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu”

Kerja sama antar daerah sering menghadapi berbagai kendala. Kendala utama meliputi perbedaan kepentingan dan prioritas antar daerah, kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta birokrasi yang berbelit. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi



hambatan signifikan. Upaya penyelarasan regulasi dan kebijakan antar daerah sering kali memakan waktu dan tenaga. Untuk mengatasi ini, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak dan strategi kolaboratif yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Berikut disampaikan beberapa kendala dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah masih ada yang belum memahami pentingnya pemetaan kerja sama daerah, hal ini berdampak sekretariat TKKSD belum bisa menyusun pemetaan kerja sama sampai saat ini.
2. Banyak kerja sama yang di tawarkan pihak ketiga hanya sampai penandatanganan Kesepakatan Bersama, tidak ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama. Kalaupun di tindaklanjuti dengan PKS masih ada yang tidak melibatkan Sekretariat TKKSD.
3. Perangkat daerah yang melakukan kerja sama tidak melaporkan hasil dari kerja sama tersebut kepada Tim TKKSD, sehingga kesulitan untuk mengukur capaian dari kerja sama yang dilakukan.

2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Agar strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara efektif, efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu factor-faktor kunci keberhasilan (*key success factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi menggunakan instrument analisis SWOT yaitu (*Strength, Weaknes, Opportunities, Threats*).

Secara efektif analisa SWOT dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimal kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*)



dan ancaman (*threats*). Dengan analisa SWOT, dapat diidentifikasi setiap potensi peluang, kekuatan, kendala dan kelemahan suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.6.1 Kekuatan

Adapun yang menjadi Kekuatan yang dimaksud pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat kebijakan pada bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan Masyarakat;
- 2) Terdapat kebijakan pada bidang perekonomian dan pembangunan, Pengadaan barang dan jasa.

2.1.6.2 Kelemahan

Adapun kelemahan adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana keagamaan;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan penataan organisasi;
- 4) Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat;
- 5) Belum optimalnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- 6) Rendahnya sarana dan parasaran kantor yang tersedia.

2.1.6.3 Peluang

Adapun Peluang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya anggaran yang memadai;
- 2) Terdapat pedoman dan aturan mengenai peningkatan SAKIP;



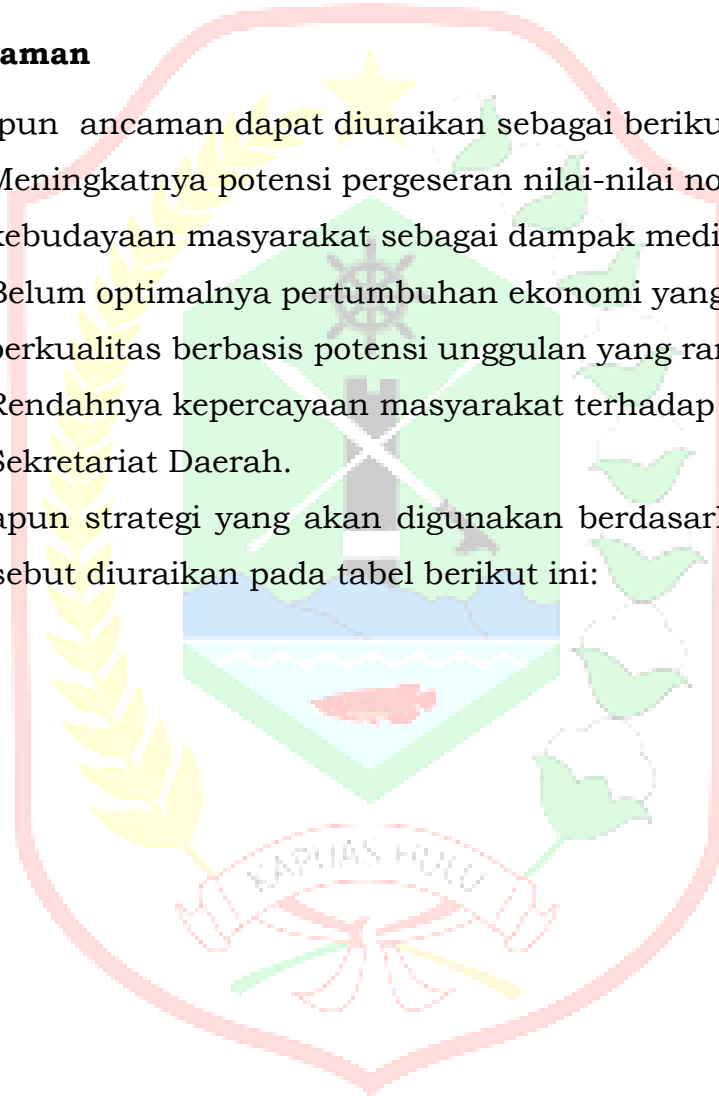
- 3) Terdapat kebijakan dan pedoman penyusunan LPPD, LKPJ dan SPM;
- 4) Terdapat kebijakan dan pedoman dalam penataan organisasi;
- 5) Terdapat kebijakan dan pedoman dalam pengadaan barang/jasa.

2.1.6.4 Ancaman

Adapun ancaman dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya potensi pergeseran nilai-nilai norma dan kebudayaan masyarakat sebagai dampak media social;
- 2) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan;
- 3) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.

Adapun strategi yang akan digunakan berdasarkan analisis SWOT tersebut diuraikan pada tabel berikut ini:





2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan factor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial pada setiap Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui factor -faktor, internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja Pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :



- 1) Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana keagamaan;
- 2) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan penataan organisasi;
- 4) Belum optimalnya pelayanan terhadap Masyarakat;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pengadaan barang/jasa;
- 6) Belum optimalnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- 7) Rendahnya sarana dan parasaran kantor yang tersedia;
- 8) Belum optimalnya pengharmonisasian kebijakan;
- 9) Meningkatnya potensi pergeseran nilai-nilai norma dan kebudayaan masyarakat sebagai dampak media social;
- 10) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan;
- 11) Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu. Hasil identifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan factor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

2.2.2.1 Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat. Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD.

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2025 - 2029 adalah : "**Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT**" (**Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil**). Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini:



- 1) **Semakin Harmonis:** Mengedepankan nilai etika, moral, dan norma dalam Masyarakat;
- 2) **Semakin Energik:** meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Kesehatan, Pembangunan keolahragaan, dan pendapatan per kapita;
- 3) **Semakin Berdaya saing:** mewujudkan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih baik, didukung SDM yang unggul;
- 4) **Semakin Amanah:** mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN;
- 5) **Semakin Terampil:** Meningkatkan kualitas SDM yang handal, kreatif, inovatif, dan produktif.

2.2.2.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan;
- 2) Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan;
- 3) Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang sehat, berdaya saing, cerdas dan inovatif dengan meningkatkan kualitas Pendidikan;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas;



- 5) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kapuas Hulu yang berkualitas dan terampil melalui pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Tabel 9 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI:	"Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)	
	Uraian	Indikator
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan	
Tujuan 1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Persentase Konflik sosial yang tertangani
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
Misi 2	Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan	
Tujuan 2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	PDRB Per Kapita
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
Misi 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas	
Tujuan 3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>



2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sehubungan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak terkait langsung dengan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi Kalimantan Barat, maka tidak ada program dan kegiatan yang berhubungan langsung.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025–2029 menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. KLHS tidak hanya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tetapi juga memperkuat perumusan isu strategis daerah yang berbasis bukti, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang. Melalui KLHS, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi risiko, peluang, serta dampak lingkungan dan sosial dari rencana pembangunan, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih holistik, responsif, dan berdaya tahan terhadap perubahan.

Rekapitulasi capaian TPB Kabupaten Kapuas Hulu mencerminkan tantangan dan progres menuju pembangunan berkelanjutan. Dari total 213 indikator TPB, sebanyak 25 indikator telah dilaksanakan dan mencapai target, 48 indikator telah dilaksanakan namun belum mencapai target, 64 indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, serta 76 indikator belum tersedia datanya.

Isu strategis yang muncul merupakan hasil identifikasi dari empat sumber utama: capaian TPB (isu capaian), muatan lingkungan hidup dari KLHS (isu lingkungan), keterkaitan dengan dokumen perencanaan terkait (isu dokumen), serta hasil penjarangan aspirasi masyarakat (isu publik).



Analisis keterkaitan antar isu tersebut menghasilkan lima isu strategis utama, yaitu:

- 1) Pengelolaan sumber daya alam dan biodiversitas yang belum optimal;
- 2) Dampak perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana alam;
- 3) Lingkungan yang rentan terhadap kerusakan dan pencemaran;
- 4) Tata kelola serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum memadai;
- 5) Pengembangan potensi daerah yang belum maksimal.

Dalam upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan lima tahun ke depan, dilakukan pemetaan prioritas TPB berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah, yaitu:

- 1) TPB 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak;
- 2) TPB 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
- 3) TPB 3 – Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 4) TPB 1 – Tanpa Kemiskinan;
- 5) TPB 4 – Pendidikan Berkualitas.

Berdasarkan telaah KLHS RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2029, dapat disimpulkan bahwa integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan sangat krusial dalam menjawab berbagai tantangan daerah. Lima isu strategis hasil analisis KLHS yakni pengelolaan sumber daya alam dan biodiversitas, risiko bencana dan perubahan iklim, kerusakan lingkungan, lemahnya tata kelola, serta pengembangan potensi daerah yang belum optimal dalam keterkaitan erat dengan isu-isu strategis dalam RPJMD, seperti akselerasi pembangunan SDM, pengentasan kemiskinan berbasis kultural, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan penguatan infrastruktur. Selain itu, tantangan kontemporer seperti pengaruh media sosial, keberadaan PLBN di wilayah perbatasan, potensi dampak Ibu Kota Negara (IKN), serta ancaman degradasi lingkungan, turut memperkuat



urgensi penyusunan perencanaan yang adaptif, berbasis data, dan berpihak pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, KLHS tidak hanya menjadi alat evaluatif terhadap pencapaian TPB, tetapi juga landasan strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kapuas Hulu lima tahun ke depan agar lebih inklusif, resilien, dan berdaya saing.

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD yaitu berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). RTRW dan KLHS perlu diperhatikan agar pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan Masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sekretariat daerah terkait secara langsung pada program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; serta program perekonomian dan Pembangunan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan.

2.2.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Isu strategis tersebut akan digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan untuk memberikan arah bagi perumusan berbagai program kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Dalam melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Perbedaan utama antara masalah (permasalahan) dan isu strategis adalah orientasi waktu dan dampak. Masalah adalah kondisi yang terjadi saat ini dan memerlukan penanganan segera. Sementara isu strategis lebih



berorientasi pada masa depan, yaitu kondisi yang berpotensi menjadi masalah serius jika tidak diantisipasi.

Hubungan Permasalahan Isu Strategis sekretariat Daerah ini diturunkan dari Hubungan dan Permasalahan Isu Strategis pada Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu periode pembangunan 2025-2029, sebagai berikut:





Tabel 10 Permasalahan dan Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
1	Terdapat kebijakan pada bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat	Rendahnya penyediaan sarana dan prasarana keagamaan	Pengelolaan sumber daya alam dan biodiversitas yang belum optimal	-	Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	1. SDM Berdaya Saing; 2. Kualitas Kehidupan Masyarakat	Akselerasi pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan	Penyediaan Sarana dan parasarana keagamaan
2		Meningkatnya potensi pergeseran nilai-nilai norma dan kebudayaan masyarakat sebagai dampak media sosial	-	Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	-	-	Antisipasi pengaruh media sosial pada kehidupan masyarakat Kapuas Hulu	Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
3								Identifikasi Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
4	1. Pertumbuhan Ekonomi Positif: Pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Kapuas Hulu membaik menjadi 4,61% pada 2024, didorong oleh sektor jasa, transportasi, dan perdagangan; 2. PDRB per Kapita Meningkat: Mencapai Rp50,08 juta pada 2023, mencerminkan kenaikan kesejahteraan makro; 3. Diversifikasi	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas berbasis potensi unggulan yang ramah lingkungan	1. Dampak perubahan iklim dan meningkatnya risiko bencana alam; 2. Lingkungan yang rentan terhadap kerusakan dan pencemaran; 3. Pengembangan potensi daerah yang belum maksimal	1. Geopolitik Dan Geoekonomi; 2. Dampak Perubahan Iklim Global	1. Resiliensi Dan Prospek Perekonomian Yang Positif; 2. Rendahnya Produktivitas; 3. Keanekaragaman Hayati Dan Potensi Lingkungan	1. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan (Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru) 2. Dampak Perubahan Iklim Global	Peningkatan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis pengembangan komoditas unggulan daerah: 1. Perbatasan dengan Negara Malaysia dan keberadaan PLBN Nanga Badau yang berdampak positif pada perekonomian; 2. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
	Lapangan Usaha: Ada peningkatan di sektor akomodasi, industri pengolahan, dan pertanian sebagai tulang punggung ekonomi							
5	Terdapat kebijakan pada bidang perekonomian dan pembangunan, Pengadaan barang dan jasa	Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan terkait pengadaan barang/ jasa	-	1. Perkembangan Teknologi; 2. Industri 5.0	-	Konektivitas dan Aksesibilitas Pemerataan Pembangunan	1. Peningkatan pengawasan eksploitasi sumber daya tak terbarukan serta pengelolaan dan mitigasi bencana, khususnya banjir; 2. Penetapan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan SDA
6	Terdapat pedoman dan aturan mengenai peningkatan SAKIP	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang belum memadai	-	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi berbasis Inovasi dan Digitalisasi	Penyusunan dokumen perencanaan
7								Administrasi Keuangan
8								Fasilitasi Pengukuran kinerja
9								Fasilitasi evaluasi Kinerja
10								Penataan administrasi pemerintahan
11								Pengelolaan administrasi kewilayahan

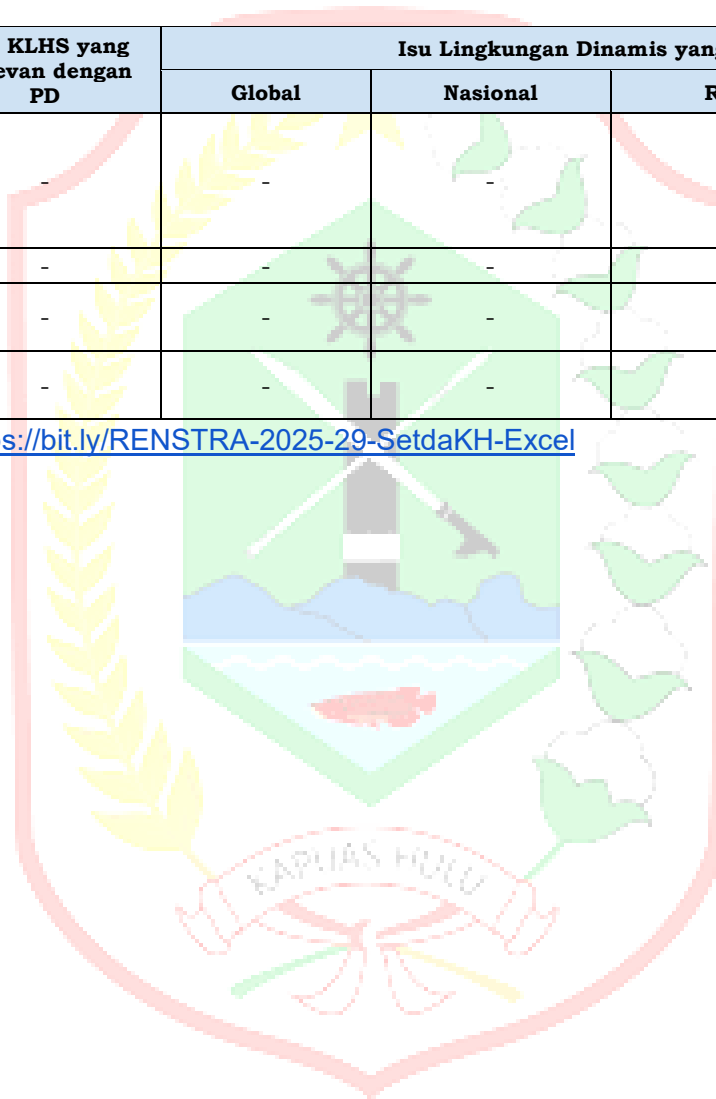


No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD					
				Global	Nasional	Regional	Kabupaten						
12								Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah					
13								Fasilitasi kerjasama dalam negeri					
14								Fasilitasi kerjasama luar negeri					
15								Evaluasi pelaksanaan kerjasama					
16	Terdapat kebijakan dan pedoman dalam penataan organisasi	Belum optimalnya pelaksanaan penataan organisasi	-	-	-	-	-	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					
17		Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					
18		Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					
19			-	-	-	-	-	Peningkatan Sarana prasarana					
20	Tersedianya anggaran yang memadai	Belum optimalnya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian						Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian					
21									-	-	-	-	pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
22									-	-	-	-	-



No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD				Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	Kabupaten	
23	Rendahnya sarana dan parasaran kantor yang tersedia		-	-	-	-	-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
24			-	-	-	-	-	Fasilitasi rapat
25			-	-	-	-	-	Penataan Arsip dinamis
26			-	-	-	-	-	Fasilitasi kunjungan tamu

Sumber: Data RPJMD 2025-2029 (diolah) <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>





BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan ideal.

Adapun tujuan Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hal internal dalam proses perencanaan Strategis sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Sekretariat Daerah Selama 5 (Lima) tahun periode 2025-2029 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran



keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan indicator:

- Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan;
- Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Perekonomian dan SDA, dengan indicator: Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

3. Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, dengan Indikator: Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.

4. Sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum, dengan indicator: Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

5. Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah, dengan indicator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah.



3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) diperlukan strategi. Adapun Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Penataan administrasi pemerintahan dan Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah;
- 2) Meningkatkan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- 3) Meningkatkan Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan;
- 4) Meningkatkan Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan;
- 5) Meningkatkan Identifikasi, evaluasi dan perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat;
- 6) Meningkatkan kebijakan yang harmonis;
- 7) Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA;
- 8) Meningkatkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang/jasa;
- 9) Meningkatkan nilai SAKIP Sekretariat Daerah;
- 10) Penilaian mandiri AKIP Setda;
- 11) Meningkatkan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, peningkatan kinerja dan RB;
- 12) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor;
- 13) Meningkatkan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 14) Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Sekretariat Daerah dalam pelayanan publik.



3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. kebijakan dapat berupa regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

- 1) Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
- 2) Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
- 3) Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat).
- 4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

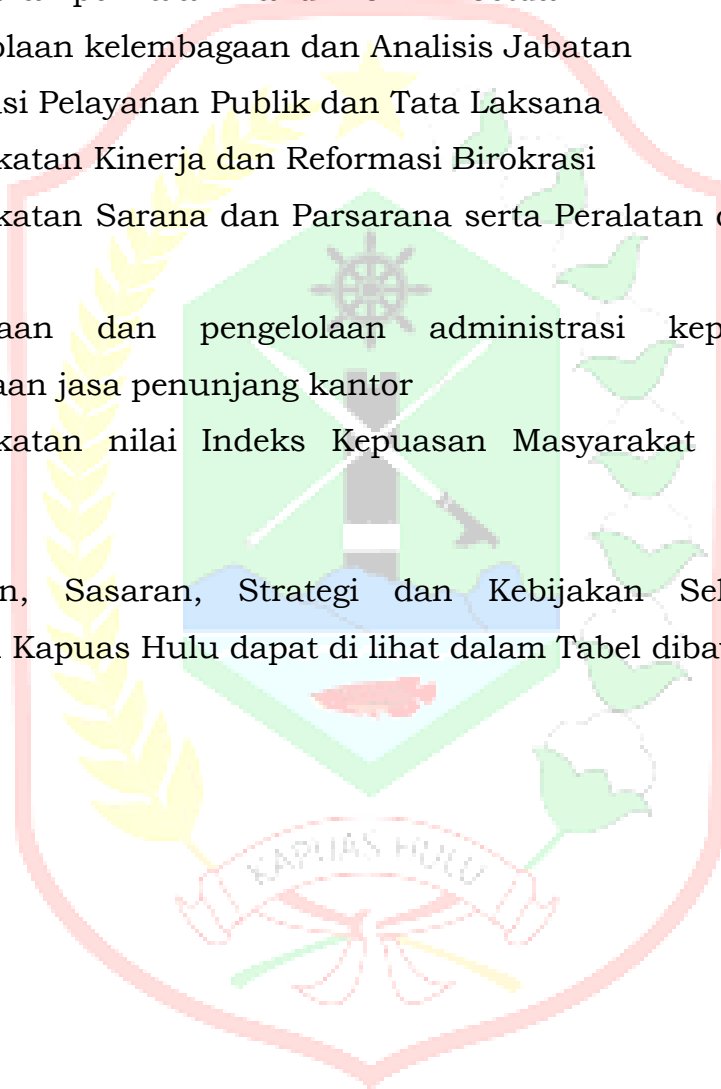
Adapun kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah
2. Fasilitasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri
3. Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama
4. Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
5. Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan
6. Mengidentifikasi, mengevaluasi dan merumuskan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat
7. Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan mengevaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA



8. Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang/jasa
9. Penyusunan Perencanaan dengan kriteria SMART, melakukan pengukuran kinerja dan mengevaluasi kinerja secara berkala
10. Melakukan penilaian mandiri SAKIP Setda
11. Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan
12. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
13. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
14. Peningkatan Sarana dan Parsarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penyediaan jasa penunjang kantor
16. Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel dibawah ini:





Tabel 11 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	"Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)		
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan Penataan administrasi pemerintahan dan Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	Penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah
		Meningkatkan kerja sama dalam negeri dan luar negeri	Fasilitasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri Mengevaluasi pelaksanaan kerja sama
		Meningkatkan Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan	Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
		Meningkatkan Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan	Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan
		Meningkatkan Identifikasi, evaluasi dan perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat	Mengidentifikasi, mengevaluasi dan merumuskan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat
Misi 2	Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan mengevaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA
		Meningkatkan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang/jasa



Misi 4			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Meningkatkan nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Penyusunan Perencanaan dengan kriteria SMART, melakukan pengukuran kinerja dan mengevaluasi kinerja secara berkala
		Penilaian mandiri AKIP Setda	Melakukan penilaian mandiri SAKIP Setda
		Meningkatkan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, peningkatan kinerja dan RB	Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Meningkatkan sarana dan prasarana kantor	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
			Peningkatan Sarana dan Parsarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Meningkatkan pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penyediaan jasa penunjang kantor
		Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Sekretariat Daerah dalam pelayanan publik	Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Pagu indikatif merupakan rancangan anggaran seproporsional mungkin atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing-masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program yang akan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Indikator: Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Indikator: Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan



3. Program Perekonomian dan Pembangunan

- Indikator: Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Indikator: Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Indikator: Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Indikator: Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Indikator: Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Indikator: Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir



7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara
9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Indikator: Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah
10. Penataan Organisasi
 - Indikator 1: Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran;
 - Indikator 2: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan;
 - Indikator 3: Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - Indikator 4: Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi;
 - Indikator 5: Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi.
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Indikator 1: Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan;
 - Indikator 2: Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan;
 - Indikator 3: Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan.
12. Administrasi Tata Pemerintahan
 - Indikator 1: Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan;



- Indikator 2: Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan;
- Indikator 3: Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk.

13. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

- Indikator 1: Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan;
- Indikator 2: Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana;
- Indikator 3: Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana.

14. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- Indikator 1: Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum;
- Indikator 2: Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum;
- Indikator 3: Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

15. Fasilitasi Kerjasama Daerah

- Indikator: Persentase Kerjasama Wajib Daerah

16. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- Indikator: Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti

17. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Indikator: Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti

18. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Indikator 1: Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing;
- Indikator 2: Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.



19. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- Indikator: Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti

4.3 Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan Sekretariat Daerah kabupaten kapuas hulu dapat di lihat dalam Tabel dibawah ini:





Tabel 12 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

VISI: "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan																RPJMD
Tujuan 1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Persentase Konflik sosial yang tertangan	100	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	RPJMD
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	0	%	95	50.551.478.594	96	51.279.649.463	97	51.537.336.144	98	54.114.202.951	100	55.737.629.040	100	55.737.629.040	SEKDA
Sasaran 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	0	%	95		95		95		95		95		95		SEKDA
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	0	Kbjkn	19	50.551.478.594	19	51.279.649.463	19	51.537.336.144	19	54.114.202.951	19	55.737.629.040	95	55.737.629.040	ASISTEN PEM KESRA
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	0	%	68		68		69		70		72		72		TAPEM
4.01.02.2.01.ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	0	%	78	614.740.084	78	617.829.231	80	620.933.900	83	651.980.595	90	671.540.013	90	671.540.013	TAPEM
4.01.02.2.01.ind3		Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	0	%	100		100		100		100		100		100		TAPEM
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	2	Dok	1	159.582.130	1	160.384.050	1	161.190.000	1	169.249.500	1	174.326.985	5	174.326.985	TAPEM
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	1	145.679.605	1	146.411.663	1	147.147.400	1	154.504.770	1	159.139.913	5	159.139.913	TAPEM
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	Dok	2	309.478.350	2	311.033.518	2	312.596.500	2	328.226.325	2	338.073.115	10	338.073.115	TAPEM
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	0	Kebijakan	11		11		11		11		11		55		KESRA
4.01.02.2.02.ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	0	Kebijakan	1	49.389.455.530	1	49.637.643.748	1	49.887.079.144	1	52.381.433.101	1	53.952.876.094	5	53.952.876.094	KESRA
4.01.02.2.02.ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	0	Kebijakan	4		4		4		4		4		20		KESRA
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	325	Dok	11	48.620.231.548	11	48.864.554.320	11	49.110.104.844	11	51.565.610.086	11	53.112.578.389	55	53.112.578.389	KESRA
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	101	Dok	1	482.352.060	1	484.775.940	1	487.212.000	1	511.572.600	1	526.919.778	5	526.919.778	KESRA



Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2	Dok	4	286.871.921	4	288.313.489	4	289.762.300	4	304.250.415	4	313.377.927	20	313.377.927	KESRA
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82	%	82	393.614.270	83	869.735.570	85	874.106.100	88	917.811.405	90	945.345.747	90	945.345.747	HUKUM
4.01.02.2.03.ind2		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	87	%	77		80		85		88		90		90		HUKUM
4.01.02.2.03.ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	50	%	100		100		100		100		100		100		100
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	618	Dok	450	177.329.170	650	423.602.843	680	425.731.500	700	447.018.075	750	460.428.617	3.230	460.428.617	HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	Kasus	13	120.010.000	10	288.899.245	10	290.351.000	10	304.868.550	10	314.014.607	53	314.014.607	HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	21	Produk Huk	150	96.275.100	150	157.233.482	150	158.023.600	150	165.924.780	150	170.902.523	750	170.902.523	HUKUM
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	91	%	100	153.668.710	100	154.440.915	100	155.217.000	100	162.977.850	100	167.867.186	100	167.867.186	TAPEM
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0	Dok	15	153.668.710	10	154.440.915	7	155.217.000	7	162.977.850	10	167.867.186	49	167.867.186	TAPEM
Misi 2	Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan															RPJMD	
Tujuan 2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	PDRB Per Kapita	0,44	%	2,10	-	2,45	-	2,59	-	2,83	-	3,00	-	3,25	-	RPJMD
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	88	%	100	4.028.583.000	100	4.374.401.350	100	4.693.332.673	100	135.033.323.344	100	5.655.405.458	100	5.655.405.458	SEKDA
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	0	Dok	19	4.028.583.000	19	4.374.401.350	19	4.693.332.673	19	135.033.323.344	19	5.655.405.458	95	5.655.405.458	ASISTEN EKMBANG
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di lindaklanjuti	0	%	100	1.149.359.000	100	1.216.980.050	100	1.234.671.305	100	1.378.138.636	100	1.515.952.499	100	1.515.952.499	EKBANG SDA
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4	Dok	2	327.688.500	2	313.142.500	2	240.450.000	2	264.495.000	2	290.944.500	10	290.944.500	EKBANG SDA
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Lap	2	361.500.000	2	397.650.000	2	437.415.000	2	481.156.500	2	529.272.150	10	529.272.150	EKBANG SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4	Dok	1	132.000.000	1	145.200.000	1	159.720.000	1	195.692.200	1	215.261.420	5	215.261.420	EKBANG SDA
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	173.030.000	1	190.333.000	5	190.333.000	EKBANG SDA
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2	Dok	1	198.170.500	1	217.987.550	1	239.786.305	1	263.764.936	1	290.141.429	5	290.141.429	EKBANG SDA



Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	0	%	100	486.231.000	100	525.129.000	100	567.139.838	100	612.511.025	100	661.511.908	100	661.511.908	EKBANG SDA
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4	Dok	1	131.131.000	1	141.621.000	1	152.951.198	1	165.187.294	1	178.402.278	5	178.402.278	EKBANG SDA
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4	Lap	1	167.650.000	1	181.062.000	1	195.546.960	1	211.190.717	1	228.085.974	5	228.085.974	EKBANG SDA
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	100	Lap	1	187.450.000	1	202.446.000	1	218.641.680	1	236.133.014	1	255.023.656	5	255.023.656	EKBANG SDA
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/seleksi dan e-purchasing	100	%	100	1.992.993.000	100	2.192.292.300	100	2.411.521.530	100	2.652.673.683	100	2.917.941.051	100	2.917.941.051	PBJ
4.01.03.2.03.ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	50	Pengguna Layanan	210		210		210		210		210	1.050		PBJ	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	544	Dok	74	1.388.265.800	65	1.527.092.380	70	1.679.801.618	75	1.847.781.780	80	2.032.559.958	364	2.032.559.958	PBJ
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	78	Pengguna Layanan	210	377.389.100	210	415.128.010	210	456.640.811	210	502.304.892	210	552.535.381	1.050	552.535.381	PBJ
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0	Orang	50	227.338.100	65	250.071.910	70	275.079.101	75	302.587.011	80	332.845.712	340	332.845.712	PBJ
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	100	400.000.000	100	440.000.000	100	480.000.000	100	130.390.000.000	100	560.000.000	100	560.000.000	EKBANG SDA
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	0	Dok	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	195.000.000	1	210.000.000	5	210.000.000	EKBANG SDA
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	0	Dok	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	195.000.000	1	210.000.000	5	210.000.000	EKBANG SDA
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	0	Dok	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000.000	1	140.000.000	5	140.000.000	EKBANG SDA



Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Misi 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas																RPJMD
Tujuan 3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	60,4	Predikat	70	-	73	-	77	-	80	-	84	-	88	-	RPJMD
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	60,40	Nilai	67,50	48.476.970.206	70,00	44.972.374.416	72,50	45.480.062.588	75,00	47.753.880.717	77,50	49.186.386.139	80,00	49.186.386.139	SEKDA
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	0,00	%	100	48.476.970.206	100	44.972.374.416	100	45.480.062.588	100	47.753.880.717	100	49.186.386.139	100	49.186.386.139	SEKDA
Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,74	Indeks	82,90	-	83,40	-	83,90	-	84,40	-	84,90	-	85,29	-	RPJMD
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	88	Nilai	84	48.476.970.206	85	44.972.374.416	86	45.480.062.588	87	47.753.880.717	88	49.186.386.139	88	49.186.386.139	PERKEU
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	0	Dok	41	48.476.970.206	30	44.972.374.416	30	45.480.062.588	25	47.753.880.717	25	49.186.386.139	151	49.186.386.139	ASISTEN ADUM
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	92	%	100	786.622.879	100	794.275.758	100	798.248.500	100	837.975.925	100	863.004.203	100	863.004.203	PERKEU
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	4	522.041.173	4	524.664.495	4	527.301.000	4	553.666.050	4	570.276.032	20	570.276.032	PERKEU
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	42.733.934	1	42.948.678	1	43.164.500	1	45.322.725	1	46.682.407	5	46.682.407	PERKEU
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	1	32.281.745	1	32.443.965	1	32.607.000	1	34.237.350	1	35.264.471	5	35.264.471	PERKEU
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	32.456.980	1	32.620.080	1	32.784.000	1	34.423.200	1	35.455.896	5	35.455.896	PERKEU
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	1	17.759.068	1	17.848.310	1	17.938.000	1	18.834.900	1	19.399.947	5	19.399.947	PERKEU
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Lap	1	109.337.371	1	109.886.805	1	110.439.000	1	115.960.950	1	119.439.779	5	119.439.779	PERKEU
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	4	30.012.608	4	30.163.425	4	30.315.000	4	31.830.750	4	32.785.673	20	32.785.673	PERKEU
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Lap	1	0	1	3.700.000	1	3.700.000	1	3.700.000	1	3.700.000	5	3.700.000	PERKEU
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	0	%	100	13.628.535.312	100	13.697.020.414	100	13.765.849.662	100	14.454.142.145	100	14.887.766.409	100	14.887.766.409	PERKEU
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	12	12.328.297.858	12	12.390.249.104	12	12.452.511.662	12	13.075.137.245	12	13.467.391.362	60	13.467.391.362	PERKEU
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	1	207.127.090	1	208.167.930	1	209.214.000	1	219.674.700	1	226.264.941	5	226.264.941	PERKEU
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	788.772.718	1	792.736.400	1	796.720.000	1	836.556.000	1	861.652.680	5	861.652.680	PERKEU



Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4.01.01.2.02.0004	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	Dok	12	30.030.428	12	30.181.335	12	30.333.000	12	31.849.650	12	32.805.140	60	32.805.140	PERKEU
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hail Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	45.072.868	1	45.299.365	1	45.527.000	1	47.803.350	1	49.237.451	5	49.237.451	PERKEU
4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1	Dok	1	189.930.356	1	190.884.780	1	191.844.000	1	201.436.200	1	207.479.286	5	207.479.286	PERKEU
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	4	32.534.202	4	32.697.690	4	32.862.000	4	34.505.100	4	35.540.253	20	35.540.253	PERKEU
4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	6.769.791	1	6.803.810	1	6.838.000	1	7.179.900	1	7.395.297	5	7.395.297	PERKEU
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100	%	95	521.811.000	95	409.807.250	95	552.976.000	95	580.624.800	95	598.043.544	95	598.043.544	UMUM
4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	2	32.910.000	2	32.660.000	2	33.000.000	2	34.650.000	2	35.689.500	10	35.689.500	UMUM
4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	1	Dok	2	39.315.000	2	40.841.000	2	39.551.000	2	41.528.550	2	42.774.407	10	42.774.407	UMUM
4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	61.516.300	1	51.804.000	1	62.059.500	1	65.162.475	1	67.117.349	5	67.117.349	UMUM
4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	4	36.981.000	4	36.525.000	4	36.975.000	4	38.823.750	4	39.988.463	20	39.988.463	UMUM
4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan	1	Laporan	1	351.088.700	1	247.977.250	1	381.390.500	1	400.460.025	1	412.473.826	5	412.473.826	UMUM
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	0	%	90	3.260.637.783	90	3.672.181.000	90	3.915.328.676	90	4.111.095.110	90	4.234.427.963	90	4.234.427.963	UMUM
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	12	120.400.000	12	120.400.000	12	120.400.000	12	126.420.000	12	130.212.600	60	130.212.600	UMUM
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	1	366.147.383	1	135.000.000	1	135.000.000	1	141.750.000	1	146.002.500	5	146.002.500	UMUM
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Bln	12	2.490.978.400	12	3.161.250.000	12	3.376.368.676	12	3.545.187.110	12	3.651.542.723	60	3.651.542.723	UMUM
4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bln	12	100.832.000	12	30.788.000	12	101.080.000	12	106.134.000	12	109.318.020	60	109.318.020	UMUM
4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Bln	12	17.150.000	12	15.000.000	12	17.350.000	12	18.217.500	12	18.764.025	60	18.764.025	UMUM
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	10	165.130.000	10	209.743.000	10	165.130.000	10	173.386.500	10	178.588.095	50	178.588.095	UMUM
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi	100	%	100	11.765.962.780	100	10.239.855.600	100	10.240.884.000	100	10.752.928.200	100	11.075.516.046	100	11.075.516.046	UMUM
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	4.225.096.350	1	145.000.000	1	145.000.000	1	152.250.000	1	156.817.500	5	156.817.500	UMUM
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	1	194.337.500	1	284.400.000	1	284.400.000	1	298.620.000	1	307.578.600	5	307.578.600	UMUM



Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	211.014.000	1	566.953.000	1	566.953.000	1	595.300.650	1	613.159.670	5	613.159.670	UMUM
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	137.530.000	1	215.000.000	1	215.000.000	1	225.750.000	1	232.522.500	5	232.522.500	UMUM
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	133.011.180	1	204.651.600	1	205.680.000	1	215.964.000	1	222.442.920	5	222.442.920	UMUM
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Kunjungan	30	1.619.138.000	30	2.117.944.000	30	2.117.944.000	30	2.223.841.200	30	2.290.556.436	150	2.290.556.436	UMUM
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500	Laporan	1.500	5.074.145.750	1.500	6.533.152.000	1.500	6.533.152.000	1.500	6.859.809.600	1.500	7.065.603.888	7.500	7.065.603.888	UMUM
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	171.690.000	1	172.755.000	1	172.755.000	1	181.392.750	1	186.834.533	5	186.834.533	UMUM
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir	100	%	100	3.559.424.000	100	551.400.000	100	551.400.000	100	578.970.000	100	596.339.100	100	596.339.100	UMUM
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	15	3.320.010.000	1	520.000.000	1	520.000.000	1	546.000.000	1	562.380.000	19	562.380.000	UMUM
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	650	239.414.000	650	31.400.000	650	31.400.000	650	32.970.000	650	33.959.100	3.250	33.959.100	UMUM
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	%	100	3.665.441.000	100	3.822.937.175	100	3.827.565.000	100	4.018.943.250	100	4.139.511.548	100	4.139.511.548	UMUM
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.053	Bulan	12	44.714.000	5.053	61.000.000	5.053	61.000.000	5.053	64.050.000	5.053	65.971.500	####	65.971.500	UMUM
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	12	1.505.000.000	12	2.161.000.000	12	2.161.000.000	12	2.269.050.000	12	2.337.121.500	60	2.337.121.500	UMUM
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Bulan	12	794.515.000	6	920.937.175	6	925.565.000	6	971.843.250	6	1.000.998.548	36	1.000.998.548	UMUM
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	12	1.321.212.000	12	680.000.000	12	680.000.000	12	714.000.000	12	735.420.000	60	735.420.000	UMUM
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	0	%	100	1.840.994.945	100	2.518.273.750	100	2.518.273.750	100	2.644.187.438	100	2.723.513.061	100	2.723.513.061	UMUM
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	34	881.544.945	39	1.299.975.000	50	1.299.975.000	34	1.364.973.750	34	1.405.922.963	191	1.405.922.963	UMUM
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	11	584.200.000	11	693.048.750	11	693.048.750	11	727.701.188	11	749.532.223	55	749.532.223	UMUM
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	375.250.000	2	525.250.000	2	525.250.000	2	551.512.500	2	568.057.875	10	568.057.875	UMUM
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	0	%	100	950.447.000	100	726.831.000	100	726.831.000	100	763.172.550	100	786.067.727	100	786.067.727	UMUM
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	12	480.231.000	12	207.831.000	12	207.831.000	12	218.222.550	12	224.769.227	60	224.769.227	UMUM
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	Layanan	2	66.500.000	7	119.000.000	7	119.000.000	7	124.950.000	7	128.698.500	30	128.698.500	UMUM



Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Base Line 2024	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA		Penanggung Jawab						
					2025		2026		2027		2028		2029		Target	Rp.							
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.									
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bulan	12	403.716.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	420.000.000	2	432.600.000	20	432.600.000	UMUM						
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	15	PD	1	742.545.481	3	746.276.865	3	750.027.000	3	787.528.350	3	811.154.201	3	811.154.201	ORGANISASI						
4.01.01.2.13.ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	5	Dok	1		1		1		1		1		1		1	1	1	1	1	ORGANISASI	
4.01.01.2.13.ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	7	PD	6		10		10		10		10		10		10	10	10	10	10	46	ORGANISASI
4.01.01.2.13.ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	6	PD	6		8		8		8		8		8		8	8	8	8	8	8	ORGANISASI
4.01.01.2.13.ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	0	PD	22		23		24		25		26		26		26	26	26	26	26	26	ORGANISASI
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	22	Dok	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ORGANISASI						
4.01.01.2.13.0001.ind2		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	5	PD	50	233.730.052	50	234.904.575	50	236.085.000	50	247.889.250	50	255.325.928	50	255.325.928	ORGANISASI						
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	50	PD	27	27	27	30	35	40	50	50	50	50	50	50	ORGANISASI						
4.01.01.2.13.0002.ind2		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	7	PD	6	236.063.541	10	237.249.790	10	238.442.000	10	250.364.100	10	257.875.023	46	257.875.023	ORGANISASI						
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ORGANISASI						
4.01.01.2.13.0003.ind2		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	6	PD	6	272.751.888	8	274.122.500	8	275.500.000	8	289.275.000	8	297.953.250	8	297.953.250	ORGANISASI						
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	0	%	81	82	83	84	86	86	86	86	86	86	86	86	PROKOPIIM						
4.01.01.2.14.ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	0	%	82	7.754.548.027	83	7.793.515.605	84	7.832.679.000	85	8.224.312.950	85	8.471.042.339	85	8.471.042.339	PROKOPIIM						
4.01.01.2.14.ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0	%	86	87	88	89	90	90	90	90	90	90	90	90	PROKOPIIM						
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1	Lyn	110	3.440.088.379	112	3.457.375.255	116	3.474.749.000	118	3.648.486.450	120	3.757.941.044	576	3.757.941.044	PROKOPIIM						
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1	Lyn	85	913.905.938	87	918.498.430	90	923.114.000	92	969.269.700	94	998.347.791	448	998.347.791	PROKOPIIM						
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1	Lyn	87	3.400.553.710	82	3.417.641.920	86	3.434.816.000	90	3.606.556.800	91	3.714.753.504	436	3.714.753.504	PROKOPIIM						
TOTAL		SASARAN PROGRAM				103.057.031.800		100.626.425.229		101.710.731.405		236.901.407.013		110.579.420.637		110.579.420.637							
						103.057.031.800		100.626.425.229		101.710.731.405		236.901.407.013		110.579.420.637		110.579.420.637							

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>



4.4 Indikator Kinerja Utama

Setelah diuraikan sebelumnya terkait Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya maka untuk selanjutnya menetapkan Indikator Kinerja Utama beserta Target yang akan dicapai dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					Sat.
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	96	97	98	100	%
			Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	95	95	95	95	%
2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	100	100	100	100	%
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	68	70	73	75	78	Nilai
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	100	100	100	100	%
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84	85	86	87	88	Nilai

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>



4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan Pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama dari pada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.



Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performance Indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan indikator yang sama di gunakan pada indikator Program:

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci, penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Berikut ini merupakan penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029:



Tabel 14 Indikator Kinerja Daerah/ Program (IKD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025-2029

No	Aspek	Program	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun					Target Akhir Renstra
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	ASPEK DAYA SAING DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Dok	0	19	19	19	19	19	95
2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Dok	0	19	19	19	19	19	95
3	ASPEK PELAYANAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	Dok	0	41	30	30	25	25	151

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang profesional, efisien, efektif serta tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Pembangunan dalam pengambilan keputusan. Hal - hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :


- 1) Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.



Berhasilnya usaha – usaha pembangunan di kabupaten Kapuas hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kejujuran dan keterbukaan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, 21 Oktober 2025

Pj Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,


Agustinus Stormandi





LAMPIRAN 1

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

ber: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZkRVtipOnBx0CWO7ZCwb88wTv2MBO3hkBx470hYOp4/edit?gid=1071219565#gid=1071219565							
No	Tujuan		Sasaran		Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Kebijakan	Kegiatan	
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah	Persentase Konflik sosial yang tertangani	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan Fasilitasi Pelaksanaan otonomi daerah	Administrasi Tata Pemerintahan	TAPEM
					Fasilitasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri	Fasilitasi Kerjasama Daerah	TAPEM
			Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	KESRA	
				Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan			
Mengidentifikasi, mengevaluasi dan merumuskan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	HUKUM					
2	Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	PDRB Per Kapita	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	EKBANG SDA
					Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan mengevaluasi Kebijakan di bidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	EKBANG SDA
						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	EKBANG SDA
						Pelaksanaan dan pemantauan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan pengadaan barang/jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Tujuan		Sasaran		Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Kebijakan	Kegiatan	
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Penyusunan Perencanaan dengan kriteria SMART, melakukan pengukuran kinerja dan mengevaluasi kinerja secara berkala	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PERKEU
					Melakukan penilaian mandiri SAKIP Setda	Administrasi Keuangan Perangkat	PERKEU
					Pengelolaan kelembagaan dan Analisis Jabatan	Penataan Organisasi	ORGANISASI
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Peningkatan Sarana dan Parsarana serta Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	UMUM
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UMUM
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UMUM						

No	Tujuan		Sasaran		Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Kebijakan	Kegiatan	
3	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penyediaan jasa penunjang kantor	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	UMUM
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	UMUM
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	UMUM
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	UMUM
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PROKOPIIM
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah		PERKEU
Sumber: https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel							

Indikator Kinerja Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Visi : "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)

Misi 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan

Tujuan : Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata

No	Indikator Tujuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PDRB Per Kapita	2,10	2,45	2,59	2,83	3,00	3,25

Sasaran		Target Kinerja						Pelaksana
Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	Bagian Perekonomian dan Pembangunan serta Bagian PBJ

Indikator Kinerja Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Visi : "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas

Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Tujuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB

Sasaran		Target Kinerja						Pelaksana
Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	67,5	70	72,5	75	77,5	80	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	100	100	100	100	100	Bagian Umum, Organisasi, Prokopim dan Perkeu

Indikator Kinerja Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Visi : "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

No	Indikator Tujuan	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	85,29

Sasaran		Target Kinerja						Pelaksana
Uraian	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	85	86	87	88	88	Bagian Perencanaan

LAMPIRAN 3

Matriks Pagu Indikatif Rencana Strategis 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

VISI: : "Terwujudnya Kapuas Hulu SEMAKIN HEBAT" (Semakin Harmonis, Semakin Energik, Semakin Berdaya Saing, Semakin Amanah dan Semakin Terampil)

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kehidupan beragama, berbudaya, sosial dan keamanan

Misi 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang energik menuju masyarakat produktif, mandiri, partisipatif, berkeadilan serta ramah investasi dan ramah lingkungan

Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, berintegritas, tertib, transparan dan akuntabilitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kondusivitas wilayah

Tujuan 2 : Meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima

No	Sasaran		Kegiatan		Anggaran pada Tahun					Pelaksana
	Uraian	Indikator	Kode	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	614.740.084	617.829.231	620.933.900	651.980.595	671.540.013	TAPEM
		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	49.389.455.530	49.637.643.748	49.887.079.144	52.381.433.101	53.952.876.094	KESRA
			4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	393.614.270	869.735.570	874.106.100	917.811.405	945.345.747	HUKUM
			4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	153.668.710	154.440.915	155.217.000	162.977.850	167.867.186	TAPEM

No	Sasaran		Kegiatan		Anggaran pada Tahun					Pelaksana
	Uraian	Indikator	Kode	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	
2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	4.01.0 3.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.149.359.000	1.216.980.050	1.234.671.305	1.378.138.636	1.515.952.499	EKBANG SDA
			4.01.0 3.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	486.231.000	525.129.000	567.139.838	612.511.025	661.511.908	EKBANG SDA
			4.01.0 3.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.992.993.000	2.192.292.300	2.411.521.530	2.652.673.683	2.917.941.051	PBJ
			4.01.0 3.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	400.000.000	440.000.000	480.000.000	130.390.000.000	560.000.000	EKBANG SDA
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	4.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	786.622.879	794.275.758	798.248.500	837.975.925	863.004.203	PERKEU
			4.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.628.535.312	13.697.020.414	13.765.849.662	14.454.142.145	14.887.766.409	PERKEU
			4.01.0 1.2.13	Penataan Organisasi	742.545.481	746.276.865	750.027.000	787.528.350	811.154.201	ORGANISAS I
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	4.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	521.811.000	409.807.250	552.976.000	580.624.800	598.043.544	UMUM
			4.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.260.637.783	3.672.181.000	3.915.328.676	4.111.095.110	4.234.427.963	UMUM
			4.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.765.962.780	10.239.855.600	10.240.884.000	10.752.928.200	11.075.516.046	UMUM
			4.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.559.424.000	551.400.000	551.400.000	578.970.000	596.339.100	UMUM

No	Sasaran		Kegiatan		Anggaran pada Tahun					Pelaksana
	Uraian	Indikator	Kode	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	
4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	4.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.665.441.000	3.822.937.175	3.827.565.000	4.018.943.250	4.139.511.548	UMUM
			4.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.840.994.945	2.518.273.750	2.518.273.750	2.644.187.438	2.723.513.061	UMUM
			4.01.0 1.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	950.447.000	726.831.000	726.831.000	763.172.550	786.067.727	UMUM
			4.01.0 1.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.754.548.027	7.793.515.605	7.832.679.000	8.224.312.950	8.471.042.339	PROKOPIM
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah								PERKEU
TOTAL					103.057.031.800	100.626.425.229	101.710.731.405	236.901.407.013	110.579.420.637	

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZkRVtipOnBx0CW07ZCwb88wTv2MBO3hkBx470hYOp4/edit?gid=1831940730#gid=1831940730>

LAMPIRAN 4

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD
Renstra 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu**

<https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>

No	Sasaran RPJMD Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Indikator RPJMD	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian (Tahun)					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya kondisivitas wilayah	Persentase Konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata	PDRB Per Kapita	%	0,44	2,10	2,45	2,59	2,83	3,00	3,25
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	60,4	70	73	77	80	84	88
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,74	82,9	83,4	83,9	84,4	84,9	85,29

Sumber: Ranwal RPJMD

**HASIL REVIU INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
TERHADAP RENSTRA TAHUN 2025-2029 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
YANG TELAH DIINPUT PADA: <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra>**

KKR	Indikator	Catatan	Rekomendasi	Keterangan Tambahan	Tanggapan	Tindak Lanjut
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dalam dokumen rankhir Renstra Setda terdapat lima sasaran. Di sini hanya ada empat sasaran, masih tersisa satu sasaran yang belum didukung dengan program/kegiatan/subkegiatan. Merupakan indikator dari sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretariat Daerah. Namun demikian sasaran ini tidak didukung dengan program/kegiatan/subkegiatan apa pun	Pertimbangkan kembali penggunaan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Sekretariat Daerah. Jika tetap digunakan, tentukan program/kegiatan/subkegiatan yang akan digunakan untuk meraih sasaran tersebut. Pertimbangkan kembali penggunaan sasaran ini, atau tentukan program/kegiatan/subkegiatan yang akan digunakan untuk meraih sasaran ini	-	Memang direncanakan tidak memiliki anggaran atau tidak terdapat Sub Kegiatan yang tepat	Sudah dimasukkan pada: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	Satuan dan Target disarankan jangan menggunakan Nilai angka, melainkan menggunakan huruf (PREDIKAT)	Satuan dan Target disarankan jangan menggunakan Nilai angka, melainkan menggunakan huruf (PREDIKAT)	-	Berdasarkan hasil diskusi Tim AKIP Kapuas Hulu bahwa Indikator Predikat diubah menjadi Nilai dengan target menggunakan nilai juga	Merubah Indikator menjadi Nilai Sakip
5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	target pada renstra terbaru pada 3 tahun awal turun dari baseline	informasikan bagaimana penetapan target di renstra terbaru dilakukan	-	Melihat trend 5 tahun terakhir pada Tahun 2021 dengan nilai 81,46, 2022 dengan nilai -, 2023 dengan nilai 83,84, 2024 dengan nilai 87,78, 2025 pada semester 1 dengan nilai 85,90. dengan melihat tren tersebut terdapat nilai yang turun naik sehingga menetapkan target dengan mengambil nilai rata-rata dari setiap nilai 4 tahun terakhir dengan nilai rata-rata 84,75. sehingga ditetapkan target nilai pada tahun 2025 sebesar 84, 2026 nilai 85, 2027 nilai 86, nilai 2028 nilai 87, 2029 nilai 88	Tetap menggunakan target yang telah ditetapkan sebelumnya

KKR	Indikator	Catatan	Rekomendasi	Keterangan Tambahan	Tanggapan	Tindak Lanjut
5.2	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	belum bisa dilakukan reviu	informasikan bagaimana penetapan target dilakukan	Data Baseline 2024 tidak tersedia atau Nol	Data tersebut pada Tahun 2024 memang tidak tersedia disebabkan merupakan indikator baru pada renstra yang baru ini	Nihil
5.3	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	belum bisa dilakukan reviu	informasikan bagaimana penetapan target dilakukan			
5.4	Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	belum bisa dilakukan reviu	informasikan bagaimana penetapan target dilakukan			
5.5	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	belum bisa dilakukan reviu	informasikan bagaimana penetapan target dilakukan			

KKR	Indikator	Catatan	Rekomendasi	Keterangan Tambahan	Tanggapan	Tindak Lanjut
6.1	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	IKD baru tersedia di Renstra 2025 2029	informasikan bagaimana penetapan target di renstra terbaru	Data Baseline 2024 tidak tersedia atau Nol	Data tersebut pada Tahun 2024 memang tidak tersedia disebabkan merupakan indikator baru pada renstra yang baru ini	Nihil
6.2	Jumlah Kebijakan Stategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	IKD baru tersedia di Renstra 2025 2029	informasikan bagaimana penetapan target di renstra terbaru			
6.3	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	IKD baru tersedia di Renstra 2025 2029	informasikan bagaimana penetapan target di renstra terbaru			
7	Seluruh indikator pada Renstra	data belum lengkap sehingga belum bisa dilakukan reuiu	lengkapi DSSD yang digunakan sebagai dasar penetapan target	Tidak terdapat Data Beseline 2022 dan 2023	Terkait data Sektoral Statistik di Kominfo, kami sudah memberikan data hampir 80% data sudah terpenuhi serta ada beberapa uraian yang seharusnya tidak ada di sub kegiatan Sekretariat Daerah. Untuk tahun 2022 dan 2023 wali datanya memang tidak diminta oleh kominfo, serta kemungkinan Kominfo belum melakukan verifikasi atau publikasi data tahun 2024.	sudah berkoordinasi dengan kominfo untuk wali data tahun 2022 dan tahun 2023 belum di minta.

Sumber: https://drive.google.com/drive/folders/1d0RF2mi0wtb20mXLLHuXz3931mSyzb4d?usp=drive_link
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZkRVtipOnBx0CWO7ZCwb88wTv2MBO3hkBx470hYOp4/edit?gid=846186093#gid=846186093>

Putussibau, Oktober 2025

Pi. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,



Agustinus Stormandi

LAMPIRAN 6

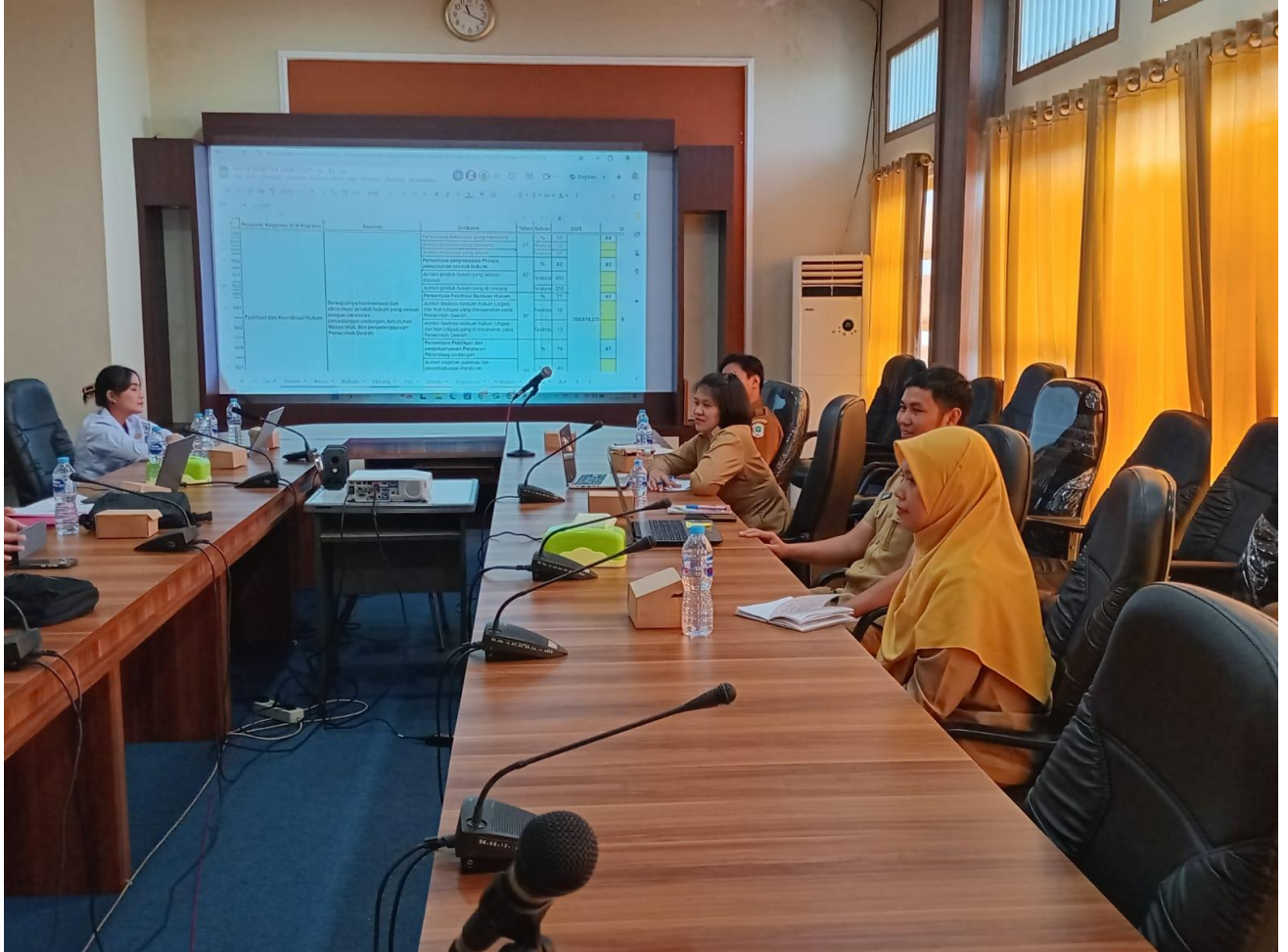
**Berikut ini adalah Bahan Rapat/ Asistensi penyusunan
RENSTRA 2025-2029
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

Sumber: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-29-SetdaKH-Excel>

No	Tahapan	Tanggal Rapat	Rincian Kegiatan	Power Ponit	Renstra Word	Renstra Pdf	Surat	Notulen	Foto Rapat	Rekaman Audio	Absensi/ Daftar Hadir	
1	RENSTRA Teknokratik	-	-	-	Link	-	-	-	-	-	-	
2	Ranwal RENSTRA	21 May 2025	Rapat persiapan pra Asistensi Ranhir	-		Link	-	-	Link	Link	Link	Link
3	Ranhir RENSTRA	Monday, 2 June 2025	Bagian Tapem	-		Link	Link	Link	-	Link	Link	Link
			Bagian Hukum	-	-				Link	Link	Link	
			Bagian Ekbang	-	-				Link	Link	Link	
		Tuesday, 3 June 2025	Bagian PBJ	-	-				Link	Link	Link	Link
			Bagian Prokopim	-	-				Link	Link	Link	
			Bagian Umum	-	-				Link	Link	Link	
Wednesday, 4 June 2025	Bagian Kesra	-	-	-	Link	Link	Link	Link	Link			

**FOTO-FOTO RAPAT/ ASISTENSI PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU**















LAMPIRAN 7

Daftar Link Dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Nama Dokumen	LINK					
1	Renstra	Penetapan	Ranhir 25-29	Ranwal 2025-29	2021-25		
2	Renja			2026	2025	2024	2023
3	Perjanjian Kinerja	2023	2024	2025	Perubahan 2025		
4	Pohon Kinerja	2021-25	2025-29				
5	Cascading Kinerja	2021-25 Revisi	2021-25 Revisi II	2025-29			
6	Crosscutting	2021-25	2021-25 Revisi	2025-29			
7	Rencana Aksi	2024	2025				
8	RKA	2023	2024	2025			
9	DPA	2023	2024	2025			
10	DPPA Pergeseran/ Penyempurnaan	2024	2025 (1)	2025 (2)			
11	DPPA	2023	2024	2025			
12	IKU	2022	2023	2024	2025		
13	IKI	2023	2025				
14	SKP						
15	SOP Renja	Link					
16	SOP Pengumpulan & Pengukuran Data Kinerja	Link					
17	SOP Evaluasi Kinerja	Link					
18	Pengukuran Kinerja	Tr 1 2024	Tr 2 2024	Tr 3 2024	Tr 4 2024	Tr 1 2025	Tr 2 2025
19	Evaluasi Kinerja/ Monev	Tr 1 2024	Tr 2 2024	Tr 3 2024	Tr 4 2024	2025	
20	Laporan Kinerja/ LKJIP	2021	2022	2023	2024		
21	LHE AKIP	2021	2022	2023	2024		
22	TL LHE	2022	2023	2024			
23	Refocusing	2024	Pergeseran 2 2025	DPPA 2025			
24	SK Tim Renstra	2025-29					
25	SK Tim SAKIP	2024	2025				
26	Laporan Keuangan	2024					
27	Laporan Hasil Evaluasi Renstra	2021-25	2025-29				
28	Penilaian Mandiri	2026	2025	2024			

Sumber: <https://bit.ly/Daftar-Pustaka-Perencanaan-Setda-KabKH>